



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka untuk menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) dalam Peraturan Daerah dimaksud, perlu diatur lebih lanjut teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4806);
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pemberian Izin gangguan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Badan Hukum adalah Suatu Bentuk Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, perorangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lain.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tidore Kepulauan.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.
11. Usaha adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang dengan maksud mencari keuntungan.
12. Tempat Usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan Perdagangan, industry, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
13. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
14. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
15. Izin Gangguan (HO) adalah izin tempat kegiatan yang diberikan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
16. Surat Izin Tempat Usaha Tidak Berdampak (SITU) adalah izin tempat kegiatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau perorangan atau badan untuk mendirikan atau memperluas usaha di lokasi tertentu yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
17. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
18. Perpanjangan izin gangguan (HO) adalah memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau potong retribusi tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kerugin dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan

ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/ kegiatan yangtelah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/ atau memperluas tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki izin gangguan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pemberian izin merupakan kewenangan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Apabila diperlukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan dari instansi teknis sesuai dengan bidang usaha yang ditunjuk;
 - c. Jangka waktu penyelesaian izin ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis;
 - d. Dalam hal berkas permohonan izin tidak memenuhi syarat dan ditolak, maka surat pengembalian berkas permohonan diterbitkan paling lama 2 (dua) hari setelah keputusan penolakan;
 - e. Penyerahan izin dilakukan setelah pemohon membayar lunas retribusi.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana contoh formulir I terlampir.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana ayat (1) pasal ini disampaikan oleh pemilik/penanggung jawab dan atau dikuasakan pada orang lain disertai surat kuasa yang sah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai tempat usaha;
 - b. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - c. foto copy KTP;
 - d. Akte pendirian badan hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan hukum);
 - e. Surat pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan milik sendiri;
 - f. Pernyataan tidak keberatan dari warga (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha;
 - g. Surat keterangan domisili tempat usaha dari Kepala Kelurahan/Desa setempat;
 - h. Dokumen lingkungan sesuai jenis usahanya;
 - i. Bukti tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - j. Bukti tanda pelunasan pajak reklame tahun terakhir;

Pasal 7

Jenis-jenis usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan, dapat langsung diberikan izin tempat usaha tidak berdampak (SITU).

Pasal 8

- (1) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengalihan izin sebagaimana diatur dalam ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pengalihan hak dari pemilik pertama ke pihak kedua yang dibuktikan dengan akta pengalihan dari notaris;
- b. Foto copy KTP;
- c. Akta perubahan bagi perusahaan berbadan hukum;
- d. Izin yang asli;
- e. Bukti tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan atas klasifikasi, kawasan, luas dan tingkat gangguan.
- (2) Tingkat gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Gangguan kecil yaitu usaha/kegiatan tersebut kurang berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, memiliki indeks gangguan sebesar 1,50.;
 - b. Gangguan sedang yaitu usaha/kegiatan tersebut tidak menyimpan, menggunakan, menghasilkan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun namun berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, memiliki indeks gangguan sebesar 1,80.;
 - c. Gangguan besar yaitu usaha/kegiatan tersebut menyimpan, menggunakan, menghasilkan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun serta berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kebauan, estetika, kenyamanan, keamanan masyarakat, bahaya kesehatan, ledakan, kebakaran, keselamatan kerja serta kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, memiliki indeks gangguan sebesar 2,00.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.- yang tidak berpotensi menimbulkan gangguan dapat langsung diberikan izin tempat usaha.

- (2) Kegiatan usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.- yang berpotensi menimbulkan gangguan diberikan izin gangguan (HO) dan dikenakan retribusi.

BAB V
PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi izin gangguan katagori izin baru dihitung berdasarkan perkalian indeks lokasi, indeks gangguan, indeks luas tempat usaha dan harga dasar sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1, 2 & 3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
- (2) Untuk memudahkan dan transparansinya penghitungan sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat dilihat tabel sebagai berikut :

➤ **Tarif Retribusi HO Kecil**

			IL		IG		ILT		Tarif		HO Kecil
1	Kawasan Pariwisata	s/d 100 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 200,000	=	Rp 300,000
		100 s/d 500 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 200,000	=	Rp 300,000
		500 s/d 1.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 200,000	=	Rp 600,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 200,000	=	Rp 750,000
		2.000 s/d 4.000 M ²	1.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 200,000	=	Rp 900,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	1.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 200,000	=	Rp 1,200,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	1.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 200,000	=	Rp 1,500,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 200,000	=	Rp 1,800,000
> 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 200,000	=	Rp 2,100,000		
2	Kawasan Perdagangan	s/d 100 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 200,000	=	Rp 600,000
		100 s/d 500 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 200,000	=	Rp 600,000
		500 s/d 1.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 200,000	=	Rp 1,200,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 200,000	=	Rp 1,500,000
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 200,000	=	Rp 1,800,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 200,000	=	Rp 2,400,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 200,000	=	Rp 3,000,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 200,000	=	Rp 3,600,000
> 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 200,000	=	Rp 4,200,000		
3	Kawasan Pendidikan	s/d 100 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 200,000	=	Rp 750,000
		100 s/d 500 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 200,000	=	Rp 750,000

		500 s/d 1.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 200,000	=	Rp 1,500,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 200,000	=	Rp 1,875,000
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 200,000	=	Rp 2,250,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 200,000	=	Rp 3,000,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 200,000	=	Rp 3,750,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 200,000	=	Rp 4,500,000
		> 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 200,000	=	Rp 5,250,000
4	Kawasan Campuran	s/d 100 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 200,000	=	Rp 900,000
		100 s/d 500 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 200,000	=	Rp 900,000
		500 s/d 1.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 200,000	=	Rp 1,800,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 200,000	=	Rp 2,250,000
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 200,000	=	Rp 2,700,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 200,000	=	Rp 3,600,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 200,000	=	Rp 4,500,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 200,000	=	Rp 5,400,000
		> 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 200,000	=	Rp 6,300,000
5	Kawasan Pemukiman	s/d 100 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 200,000	=	Rp 1,050,000
		100 s/d 500 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 200,000	=	Rp 1,050,000
		500 s/d 1.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 200,000	=	Rp 2,100,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 200,000	=	Rp 2,625,000
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 200,000	=	Rp 3,150,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 200,000	=	Rp 4,200,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 200,000	=	Rp 5,250,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 200,000	=	Rp 6,300,000
		> 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 200,000	=	Rp 7,350,000

➤ Tarif Retribusi HO Sedang

			IL		IG		ILT		Tarif		HO Sedang
1	Kawasan Pariwisata	s/d 100 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 250,000	=	Rp 375,000
		100 s/d 500 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 250,000	=	Rp 375,000
		500 s/d 1.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 250,000	=	Rp 750,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 250,000	=	Rp 937,500
		2.000 s/d 4.000 M ²	1.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 250,000	=	Rp 1,125,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	1.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 250,000	=	Rp 1,500,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	1.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 250,000	=	Rp 1,875,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 250,000	=	Rp 2,250,000
		> 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 250,000	=	Rp 2,625,000
2	Kawasan Perdagangan	s/d 100 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 250,000	=	Rp 750,000
		100 s/d 500 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 250,000	=	Rp 750,000
		500 s/d 1.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 250,000	=	Rp 1,500,000

		1.000 s/d 2.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 250,000	=	Rp 1,875,000
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 250,000	=	Rp 2,250,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 250,000	=	Rp 3,000,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 250,000	=	Rp 3,750,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 250,000	=	Rp 4,500,000
		> 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 250,000	=	Rp 5,250,000
3	Kawasan Pendidikan	s/d 100 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 250,000	=	Rp 937,500
		100 s/d 500 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 250,000	=	Rp 937,500
		500 s/d 1.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 250,000	=	Rp 1,875,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 250,000	=	Rp 2,343,750
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 250,000	=	Rp 2,812,500
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 250,000	=	Rp 3,750,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 250,000	=	Rp 4,687,500
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 250,000	=	Rp 5,625,000
		> 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 250,000	=	Rp 6,562,500
4	Kawasan Campuran	s/d 100 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 250,000	=	Rp 1,125,000
		100 s/d 500 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 250,000	=	Rp 1,125,000
		500 s/d 1.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 250,000	=	Rp 2,250,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 250,000	=	Rp 2,812,500
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 250,000	=	Rp 3,375,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 250,000	=	Rp 4,500,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 250,000	=	Rp 5,625,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 250,000	=	Rp 6,750,000
		> 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 250,000	=	Rp 7,875,000
5	Kawasan Pemukiman	s/d 100 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 250,000	=	Rp 1,312,500
		100 s/d 500 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 250,000	=	Rp 1,312,500
		500 s/d 1.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 250,000	=	Rp 2,625,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 250,000	=	Rp 3,281,250
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 250,000	=	Rp 3,937,500
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 250,000	=	Rp 5,250,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 250,000	=	Rp 6,562,500
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 250,000	=	Rp 7,875,000
		> 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 250,000	=	Rp 9,187,500

➤ Tarif Retribusi HO Besar

			IL		IG		ILT		Tarif		HO Besar
1	Kawasan	s/d 100 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 350,000	=	Rp 525,000

Pariwisata											
		100 s/d 500 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 350,000	=	Rp 525,000
		500 s/d 1.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 350,000	=	Rp 1,050,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 350,000	=	Rp 1,312,500
		2.000 s/d 4.000 M ²	1.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 350,000	=	Rp 1,575,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	1.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 350,000	=	Rp 2,100,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	1.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 350,000	=	Rp 2,625,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 350,000	=	Rp 3,150,000
		> 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 350,000	=	Rp 3,675,000
2	Kawasan Perdagangan	s/d 100 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 350,000	=	Rp 1,050,000
		100 s/d 500 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 350,000	=	Rp 1,050,000
		500 s/d 1.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 350,000	=	Rp 2,100,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 350,000	=	Rp 2,625,000
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 350,000	=	Rp 3,150,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 350,000	=	Rp 4,200,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 350,000	=	Rp 5,250,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 350,000	=	Rp 6,300,000
		> 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 350,000	=	Rp 7,350,000
3	Kawasan Pendidikan	s/d 100 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 350,000	=	Rp 1,312,500
		100 s/d 500 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 350,000	=	Rp 1,312,500
		500 s/d 1.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 350,000	=	Rp 2,625,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 350,000	=	Rp 3,281,250
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 350,000	=	Rp 3,937,500
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 350,000	=	Rp 5,250,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 350,000	=	Rp 6,562,500
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 350,000	=	Rp 7,875,000
		> 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 350,000	=	Rp 9,187,500
4	Kawasan Campuran	s/d 100 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 350,000	=	Rp 1,575,000
		100 s/d 500 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 350,000	=	Rp 1,575,000
		500 s/d 1.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 350,000	=	Rp 3,150,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 350,000	=	Rp 3,937,500
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 350,000	=	Rp 4,725,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 350,000	=	Rp 6,300,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 350,000	=	Rp 7,875,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 350,000	=	Rp 9,450,000
		> 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 350,000	=	Rp 11,025,000
5	Kawasan Pemukiman	s/d 100 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 350,000	=	Rp 1,837,500
		100 s/d 500 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 350,000	=	Rp 1,837,500
		500 s/d 1.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 350,000	=	Rp 3,675,000

1.000 s/d 2.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 350,000	=	Rp 4,593,750
2.000 s/d 4.000 M ²	3.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 350,000	=	Rp 5,512,500
4.000 s/d 6.000 M ²	3.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 350,000	=	Rp 7,350,000
6.000 s/d 8.000 M ²	3.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 350,000	=	Rp 9,187,500
8.000 s/d 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 350,000	=	Rp 11,025,000
> 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 350,000	=	Rp 12,862,500

- (3) Tarif retribusi perpanjangan izin gangguan ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku, dengan perhitungan sebagai berikut :

➤ Tarif Retribusi HO Kecil

			IL		IG		ILT		Tarif		HO Kecil (ILxIGxILTx75 %)
1	Kawasan Pariwisata	s/d 100 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 150,000	=	Rp 225,000
		100 s/d 500 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 150,000	=	Rp 225,000
		500 s/d 1.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 150,000	=	Rp 450,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 150,000	=	Rp 562,500
		2.000 s/d 4.000 M ²	1.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 150,000	=	Rp 675,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	1.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 150,000	=	Rp 900,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	1.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 150,000	=	Rp 1,125,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 150,000	=	Rp 1,350,000
		> 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 150,000	=	Rp 1,575,000
2	Kawasan Perdagangan	s/d 100 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 150,000	=	Rp 450,000
		100 s/d 500 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 150,000	=	Rp 450,000
		500 s/d 1.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 150,000	=	Rp 900,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 150,000	=	Rp 1,125,000
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 150,000	=	Rp 1,350,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 150,000	=	Rp 1,800,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 150,000	=	Rp 2,250,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 150,000	=	Rp 2,700,000
		> 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 150,000	=	Rp 3,150,000
3	Kawasan Pendidikan	s/d 100 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 150,000	=	Rp 562,500
		100 s/d 500 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 150,000	=	Rp 562,500
		500 s/d 1.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 150,000	=	Rp 1,125,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 150,000	=	Rp 1,406,250
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 150,000	=	Rp 1,687,500
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 150,000	=	Rp 2,250,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 150,000	=	Rp 2,812,500

		8.000 s/d 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 150,000	=	Rp 3,375,000
		> 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 150,000	=	Rp 3,937,500
4	Kawasan Campuran	s/d 100 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 150,000	=	Rp 675,000
		100 s/d 500 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 150,000	=	Rp 675,000
		500 s/d 1.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 150,000	=	Rp 1,350,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 150,000	=	Rp 1,687,500
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 150,000	=	Rp 2,025,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 150,000	=	Rp 2,700,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 150,000	=	Rp 3,375,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 150,000	=	Rp 4,050,000
		> 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 150,000	=	Rp 4,725,000
5	Kawasan Pemukiman	s/d 100 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 150,000	=	Rp 787,500
		100 s/d 500 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 150,000	=	Rp 787,500
		500 s/d 1.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 150,000	=	Rp 1,575,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 150,000	=	Rp 1,968,750
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 150,000	=	Rp 2,362,500
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 150,000	=	Rp 3,150,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 150,000	=	Rp 3,937,500
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 150,000	=	Rp 4,725,000
		> 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 150,000	=	Rp 5,512,500

➤ Tarif Retribusi HO Sedang

			IL	IG	ILT	Tarif	HO Sedang (ILxIGxILTx75 %)
1	Kawasan Pariwisata	s/d 100 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 281,250
		100 s/d 500 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 281,250
		500 s/d 1.000 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 562,500
		1.000 s/d 2.000 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 703,125
		2.000 s/d 4.000 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 843,750
		4.000 s/d 6.000 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 1,125,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 1,406,250
		8.000 s/d 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 1,687,500
		> 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 1,968,750
2	Kawasan Perdagangan	s/d 100 M ²	2.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 562,500
		100 s/d 500 M ²	2.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 562,500
		500 s/d 1.000 M ²	2.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 1,125,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.0	x	1.5	x	Rp 187,500 = Rp 1,406,250

		2.000 s/d 4.000 M ²	2.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 187,500	=	Rp 1,687,500
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 187,500	=	Rp 2,250,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 187,500	=	Rp 2,812,500
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 187,500	=	Rp 3,375,000
		> 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 187,500	=	Rp 3,937,500
3	Kawasan Pendidikan	s/d 100 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 187,500	=	Rp 703,125
		100 s/d 500 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 187,500	=	Rp 703,125
		500 s/d 1.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 187,500	=	Rp 1,406,250
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 187,500	=	Rp 1,757,813
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 187,500	=	Rp 2,109,375
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 187,500	=	Rp 2,812,500
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 187,500	=	Rp 3,515,625
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 187,500	=	Rp 4,218,750
		> 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 187,500	=	Rp 4,921,875
4	Kawasan Campuran	s/d 100 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 187,500	=	Rp 843,750
		100 s/d 500 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 187,500	=	Rp 843,750
		500 s/d 1.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 187,500	=	Rp 1,687,500
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 187,500	=	Rp 2,109,375
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 187,500	=	Rp 2,531,250
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 187,500	=	Rp 3,375,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 187,500	=	Rp 4,218,750
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 187,500	=	Rp 5,062,500
		> 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 187,500	=	Rp 5,906,250
5	Kawasan Pemukiman	s/d 100 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 187,500	=	Rp 984,375
		100 s/d 500 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 187,500	=	Rp 984,375
		500 s/d 1.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 187,500	=	Rp 1,968,750
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 187,500	=	Rp 2,460,938
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 187,500	=	Rp 2,953,125
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 187,500	=	Rp 3,937,500
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 187,500	=	Rp 4,921,875
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 187,500	=	Rp 5,906,250
		> 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 187,500	=	Rp 6,890,625

➤ Tarif Retribusi HO Besar

			IL	IG	ILT	Tarif	HO Besar (ILxIGxILTx75 %)		
1	Kawasan Pariwisata	s/d 100 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 262,500	=	Rp 393,750
		100 s/d 500 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 262,500	=	Rp 393,750
		500 s/d 1.000 M ²	1.0	x	1.5	x	Rp 262,500	=	Rp 787,500

		1.000 s/d 2.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 262,500	=	Rp 984,375
		2.000 s/d 4.000 M ²	1.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 262,500	=	Rp 1,181,250
		4.000 s/d 6.000 M ²	1.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 262,500	=	Rp 1,575,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	1.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 262,500	=	Rp 1,968,750
		8.000 s/d 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 262,500	=	Rp 2,362,500
		> 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 262,500	=	Rp 2,756,250
2	Kawasan Perdagangan	s/d 100 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 262,500	=	Rp 787,500
		100 s/d 500 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 262,500	=	Rp 787,500
		500 s/d 1.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 262,500	=	Rp 1,575,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 262,500	=	Rp 1,968,750
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 262,500	=	Rp 2,362,500
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 262,500	=	Rp 3,150,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 262,500	=	Rp 3,937,500
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 262,500	=	Rp 4,725,000
		> 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 262,500	=	Rp 5,512,500
3	Kawasan Pendidikan	s/d 100 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 262,500	=	Rp 984,375
		100 s/d 500 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 262,500	=	Rp 984,375
		500 s/d 1.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 262,500	=	Rp 1,968,750
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 262,500	=	Rp 2,460,938
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 262,500	=	Rp 2,953,125
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 262,500	=	Rp 3,937,500
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 262,500	=	Rp 4,921,875
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 262,500	=	Rp 5,906,250
		> 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 262,500	=	Rp 6,890,625
4	Kawasan Campuran	s/d 100 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 262,500	=	Rp 1,181,250
		100 s/d 500 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 262,500	=	Rp 1,181,250
		500 s/d 1.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 262,500	=	Rp 2,362,500
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 262,500	=	Rp 2,953,125
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 262,500	=	Rp 3,543,750
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 262,500	=	Rp 4,725,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 262,500	=	Rp 5,906,250
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 262,500	=	Rp 7,087,500
		> 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 262,500	=	Rp 8,268,750
5	Kawasan Pemukiman	s/d 100 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 262,500	=	Rp 1,378,125
		100 s/d 500 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 262,500	=	Rp 1,378,125
		500 s/d 1.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 262,500	=	Rp 2,756,250
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 262,500	=	Rp 3,445,313
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 262,500	=	Rp 4,134,375
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 262,500	=	Rp 5,512,500
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 262,500	=	Rp 6,890,625

8.000 s/d 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 262,500	=	Rp 8,268,750
> 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 262,500	=	Rp 9,646,875

(4) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dan atau perubahan jenis usaha ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku dengan perhitungan sebagai berikut :

➤ Tarif Retribusi HO Kecil

								HO Kecil		
		IL		IG		ILT		(ILxIGxILTx50%)		
		Tarif								
1	Kawasan Pariwisata	s/d 100 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 100,000	= Rp 150,000
		100 s/d 500 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 100,000	= Rp 150,000
		500 s/d 1.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 100,000	= Rp 300,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 100,000	= Rp 375,000
		2.000 s/d 4.000 M ²	1.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 100,000	= Rp 450,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	1.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 100,000	= Rp 600,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	1.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 100,000	= Rp 750,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 100,000	= Rp 900,000
> 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 100,000	= Rp 1,050,000		
2	Kawasan Perdagangan	s/d 100 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 100,000	= Rp 300,000
		100 s/d 500 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 100,000	= Rp 300,000
		500 s/d 1.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 100,000	= Rp 600,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 100,000	= Rp 750,000
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 100,000	= Rp 900,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 100,000	= Rp 1,200,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 100,000	= Rp 1,500,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 100,000	= Rp 1,800,000
> 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 100,000	= Rp 2,100,000		
3	Kawasan Pendidikan	s/d 100 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 100,000	= Rp 375,000
		100 s/d 500 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 100,000	= Rp 375,000
		500 s/d 1.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 100,000	= Rp 750,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 100,000	= Rp 937,500
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 100,000	= Rp 1,125,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 100,000	= Rp 1,500,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 100,000	= Rp 1,875,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 100,000	= Rp 2,250,000
> 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 100,000	= Rp 2,625,000		

4	Kawasan Campuran	s/d 100 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 100,000	=	Rp 450,000
		100 s/d 500 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 100,000	=	Rp 450,000
		500 s/d 1.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 100,000	=	Rp 900,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 100,000	=	Rp 1,125,000
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 100,000	=	Rp 1,350,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 100,000	=	Rp 1,800,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 100,000	=	Rp 2,250,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 100,000	=	Rp 2,700,000
		> 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 100,000	=	Rp 3,150,000
5	Kawasan Pemukiman	s/d 100 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 100,000	=	Rp 525,000
		100 s/d 500 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 100,000	=	Rp 525,000
		500 s/d 1.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 100,000	=	Rp 1,050,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 100,000	=	Rp 1,312,500
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 100,000	=	Rp 1,575,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 100,000	=	Rp 2,100,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 100,000	=	Rp 2,625,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 100,000	=	Rp 3,150,000
		> 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 100,000	=	Rp 3,675,000

➤ Tarif Retribusi HO Sedang

		IL	IG	ILT	Tarif	HO Sedang (ILxIGxILTx75 %)					
1	Kawasan Pariwisata	s/d 100 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 187,500	=	Rp 281,250
		100 s/d 500 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 187,500	=	Rp 281,250
		500 s/d 1.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 187,500	=	Rp 562,500
		1.000 s/d 2.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 187,500	=	Rp 703,125
		2.000 s/d 4.000 M ²	1.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 187,500	=	Rp 843,750
		4.000 s/d 6.000 M ²	1.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 187,500	=	Rp 1,125,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	1.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 187,500	=	Rp 1,406,250
		8.000 s/d 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 187,500	=	Rp 1,687,500
		> 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 187,500	=	Rp 1,968,750
2	Kawasan Perdagangan	s/d 100 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 125,000	=	Rp 375,000
		100 s/d 500 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 125,000	=	Rp 375,000
		500 s/d 1.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 125,000	=	Rp 750,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 125,000	=	Rp 937,500
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 125,000	=	Rp 1,125,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 125,000	=	Rp 1,500,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 125,000	=	Rp 1,875,000

		8.000 s/d 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 125,000	=	Rp 2,250,000
		> 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 125,000	=	Rp 2,625,000
3	Kawasan Pendidikan	s/d 100 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 125,000	=	Rp 468,750
		100 s/d 500 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 125,000	=	Rp 468,750
		500 s/d 1.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 125,000	=	Rp 937,500
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 125,000	=	Rp 1,171,875
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 125,000	=	Rp 1,406,250
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 125,000	=	Rp 1,875,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 125,000	=	Rp 2,343,750
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 125,000	=	Rp 2,812,500
		> 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 125,000	=	Rp 3,281,250
4	Kawasan Campuran	s/d 100 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 125,000	=	Rp 562,500
		100 s/d 500 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 125,000	=	Rp 562,500
		500 s/d 1.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 125,000	=	Rp 1,125,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 125,000	=	Rp 1,406,250
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 125,000	=	Rp 1,687,500
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 125,000	=	Rp 2,250,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 125,000	=	Rp 2,812,500
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 125,000	=	Rp 3,375,000
		> 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 125,000	=	Rp 3,937,500
5	Kawasan Pemukiman	s/d 100 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 125,000	=	Rp 656,250
		100 s/d 500 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 125,000	=	Rp 656,250
		500 s/d 1.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 125,000	=	Rp 1,312,500
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 125,000	=	Rp 1,640,625
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 125,000	=	Rp 1,968,750
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 125,000	=	Rp 2,625,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 125,000	=	Rp 3,281,250
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 125,000	=	Rp 3,937,500
		> 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 125,000	=	Rp 4,593,750

➤ Tarif Retribusi HO Besar

			IL		IG		ILT		Tarif	=	HO Besar (ILxIGxILTx75 %)
1	Kawasan Pariwisata	s/d 100 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 175,000	=	Rp 262,500
		100 s/d 500 M ²	1.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 175,000	=	Rp 262,500
		500 s/d 1.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 175,000	=	Rp 525,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	1.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 175,000	=	Rp 656,250
		2.000 s/d 4.000 M ²	1.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 175,000	=	Rp 787,500

		4.000 s/d 6.000 M ²	1.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 175,000	=	Rp 1,050,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	1.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 175,000	=	Rp 1,312,500
		8.000 s/d 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 175,000	=	Rp 1,575,000
		> 10.000 M ²	1.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 175,000	=	Rp 1,837,500
2	Kawasan Perdagangan	s/d 100 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 175,000	=	Rp 525,000
		100 s/d 500 M ²	2.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 175,000	=	Rp 525,000
		500 s/d 1.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 175,000	=	Rp 1,050,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 175,000	=	Rp 1,312,500
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 175,000	=	Rp 1,575,000
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 175,000	=	Rp 2,100,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 175,000	=	Rp 2,625,000
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 175,000	=	Rp 3,150,000
		> 10.000 M ²	2.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 175,000	=	Rp 3,675,000
3	Kawasan Pendidikan	s/d 100 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 175,000	=	Rp 656,250
		100 s/d 500 M ²	2.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 175,000	=	Rp 656,250
		500 s/d 1.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 175,000	=	Rp 1,312,500
		1.000 s/d 2.000 M ²	2.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 175,000	=	Rp 1,640,625
		2.000 s/d 4.000 M ²	2.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 175,000	=	Rp 1,968,750
		4.000 s/d 6.000 M ²	2.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 175,000	=	Rp 2,625,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	2.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 175,000	=	Rp 3,281,250
		8.000 s/d 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 175,000	=	Rp 3,937,500
		> 10.000 M ²	2.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 175,000	=	Rp 4,593,750
4	Kawasan Campuran	s/d 100 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 175,000	=	Rp 787,500
		100 s/d 500 M ²	3.0	x	1.5	x	1.0	x	Rp 175,000	=	Rp 787,500
		500 s/d 1.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.0	x	Rp 175,000	=	Rp 1,575,000
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.0	x	1.5	x	2.5	x	Rp 175,000	=	Rp 1,968,750
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.0	x	1.5	x	3.0	x	Rp 175,000	=	Rp 2,362,500
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.0	x	1.5	x	4.0	x	Rp 175,000	=	Rp 3,150,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.0	x	1.5	x	5.0	x	Rp 175,000	=	Rp 3,937,500
		8.000 s/d 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	6.0	x	Rp 175,000	=	Rp 4,725,000
		> 10.000 M ²	3.0	x	1.5	x	7.0	x	Rp 175,000	=	Rp 5,512,500
5	Kawasan Pemukiman	s/d 100 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 175,000	=	Rp 918,750
		100 s/d 500 M ²	3.5	x	1.5	x	1.0	x	Rp 175,000	=	Rp 918,750
		500 s/d 1.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.0	x	Rp 175,000	=	Rp 1,837,500
		1.000 s/d 2.000 M ²	3.5	x	1.5	x	2.5	x	Rp 175,000	=	Rp 2,296,875
		2.000 s/d 4.000 M ²	3.5	x	1.5	x	3.0	x	Rp 175,000	=	Rp 2,756,250
		4.000 s/d 6.000 M ²	3.5	x	1.5	x	4.0	x	Rp 175,000	=	Rp 3,675,000
		6.000 s/d 8.000 M ²	3.5	x	1.5	x	5.0	x	Rp 175,000	=	Rp 4,593,750

8.000 s/d 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	6.0	x	Rp 175,000	=	Rp 5,512,500
> 10.000 M ²	3.5	x	1.5	x	7.0	x	Rp 175,000	=	Rp 6,431,250

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi izin gangguan (HO) dipungut berdasarkan SKRD sebagaimana formulir II terlampir;
- (2) Bentuk dan isi SKRD, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tata cara pengisian dan penyampaian SKRD serta pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai SOP

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan sekaligus/ lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran yang terhutang dimaksud pada ayat (2) dapat diangsur setiap bulan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak STRD di terbitkan.
- (4) Tunggakan terhutang sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari jumlah pokok retribusi tertunggak ditambah bunga 2 % per bulan yang dihitung dari jumlah pokok tertunggak.
- (5) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilunasi, maka diberikan penundaan pembayaran selambat-lambatnya 1(satu) bulan berikutnya.
- (6) Bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat lagi melunasi maka permohonan izin tidak dapat diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (2) Bentuk dan isi SSRD, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran SSRD dilakukan berdasarkan SOP

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENGURANGAN

Pasal 16

Walikota berdasarkan permohonan dan atau tanpa permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.

Pasal 17

- (1) Keringanan atau Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan wajib retribusi/ masyarakat kurang mampu.

(2) Masyarakat kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).

(3) Keringanan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan potongan sebesar 50 % dari nilai SKRD.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 18

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PENUTUPAN TEMPAT USAHA

Pasal 20

(1) Kegiatan yang tidak memiliki izin gangguan dapat tutup, disegel, atau dihentikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Penutupan/ penyegelan/ penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi teguran atau peringatan.

Pasal 21

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan, penutupan, penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin, apabila:

a. Pemegang izin melakukan perubahan usaha/ kegiatan tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

- b. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan lokasi yang dilarang untuk usaha/ kegiatan;
- c. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 18 Nopember 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 18 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 252

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 Nopember 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN

FORMULIR PENDAFTARAN IZIN GANGGUAN

KEPADA
YTH. BPK. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN Cq.
BPK KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
DI,-
TIDORE

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin gangguan (HO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2013 serta akan pelaksanaannya.

- Nama Pemilik Penanggung Jawab :
- Alamat :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Bidang usaha :
- Jenis kegiatan usaha :
- No. Telp/HP :
- Sarana dan prasarana yang dimiliki :

Untuk melengkapi permohonan ini kami lampirkan bahan – bahan sebagai berikut :

1. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai tempat usaha.
2. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) dan lampiran gambar.
3. foto copy KTP.
4. Akte pendirian badan hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan hukum).
5. Surat pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan milik sendiri.
6. Pernyataan tidak keberatan dari warga (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha
7. Surat keterangan domisili tempat usaha dari Kepala Kelurahan/Desa setempat.


8. Surat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup.
9. Bukti tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir.
10. Bukti tanda pelunasan pajak reklame tahun terakhir

Demikian kami sampaikan dan sebelumnya di ucapkan terima kasih.

Yang bermohon,

(.....)

1. SKRD.....

 <p>PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</p>	<p>SKRD IZIN GANGGUAN (HO)</p>
<p style="text-align: center;">Nomor :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO), ditetapkan :</p> <p>Nama Pemilik/Penanggung jawab : Alamat : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Luas Tempat Usaha : Tarif Retribusi : Rp.</p> <p>Retribusi Izin Gangguan (HO) dihitung berdasarkan hasil perkalian dengan rumus (HO = IL x IG x ILT x HARGA DASAR)</p> <p>IL : IG : ILT : Harga Dasar : Rp.</p> <p>Terbilang :</p> <p style="text-align: right;">Tidore, Bendahara Penerima (.....) NIP.</p> <p>Telah dibayar sesuai ketentuan sebesar Rp. (.....) Pada tanggal</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Wajib Retribusi Petugas (.....) (.....) NIP. </p>	

Bentuk : persegi empat
 Ukuran : 21 cm x 16 cm
 Dicitak dalam 4 warna yang berbeda

2. SSRD

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA TIDORE KEPULAUAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR	
Nama Perusahaan	:
Nama Pemilik	:
TANDA BUKTI SETORAN	
SUDAH TERIMA DARI	:
UANG SEJUMLAH	:
UNTUK SETORAN	: Retribusi Izin Gangguan (HO)
TERBILANG	:
<div style="border: 2px solid black; height: 20px; width: 100%; background-color: #f0f0f0;"></div>	
	Tidore,
YANG MENERIMA	YANG MENYETOR
(.....) NIP.	(.....) NIP.

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA